Kelompok A7

Nama Kelompok:

- 1. Ading Intan A Nim 10191003
- 2. Farhan Ramadhani Nim 10191028
- 3. Nayumi Oriza P Nim 10191064
- 4. Sallie Trixie Nim 10191077

Kasus

Pada bulan September 2011, WikiLeaks (sebuah organisasi nirlaba yang tujuannya adalah untuk "membawa berita dan informasi penting kepada publik") menerbitkan lebih dari 250.000 kabel diplomatik rahasia AS di situs Web-nya. Termasuk dalam cache komunikasi pribadi antara karyawan Departemen Luar Negeri AS adalah permintaan yang dibuat dari diplomat AS yang bertugas di kedutaan luar negeri untuk mengumpulkan informasi intelijen untuk tujuan spionase. Secara khusus, diplomat ditugaskan untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang pejabat asing termasuk alamat email, nomor kartu kredit, dan bahkan nomor rekening frequent flier. Dokumen-dokumen ini dipublikasikan kurang dari setahun setelah WikiLeaks merilis sekitar 400.000 dokumen rahasia Angkatan Darat AS—sebuah kebocoran yang diyakini sebagai yang terbesar dalam sejarah AS.

Dokumen Angkatan Darat yang bocor konon mengungkap contoh di mana tentara Amerika berdiri di samping saat pasukan keamanan Irak yang didominasi Syiah menyiksa tahanan Sunni. Dokumen-dokumen itu juga diduga mengungkapkan tambahan 15.000 kematian warga sipil yang tidak dilaporkan selama Perang Irak. "Dokumen dump" ini sebenarnya kebocoran besar ketiga rahasia militer AS tahun 2010. Pada bulan April, organisasi telah memposting video helikopter Angkatan Darat AS melakukan operasi di mana warga sipil dan dua wartawan Reuters tewas di Irak. Kemudian pada bulan Juli, WikiLeaks memposting 92.000 memo militer yang konon menegaskan bahwa badan intelijen Pakistan secara teratur bertemu dengan pejuang Taliban. Pemerintah Amerika Serikat, sementara itu, berusaha keras untuk menuntut WikiLeaks dan mencegah kebocoran di masa depan. Namun, Amandemen Pertama menjamin kebebasan pers warga negara dan sangat sedikit pembatasan yang diizinkan oleh Mahkamah Agung AS. Contoh paling menonjol dari pengekangan yudisial itu adalah ketika Presiden Richard Nixon berusaha mencari perintah terhadap penerbitan Pentagon Papers, yang berisi rahasia militer dari Perang Vietnam, dan Mahkamah Agung AS menolak. Pada tahun 2010, Layanan Penelitian Kongres mengeluarkan laporan di mana mereka menyimpulkan bahwa tidak ada penerbit informasi yang bocor yang pernah dituntut karena menerbitkan materi, karena implikasi untuk Amandemen Pertama. Akibatnya, satu-satunya tindakan hukum yang dapat diambil pemerintah AS adalah mendakwa seorang prajurit Angkatan Darat, Bradley Manning, dengan melanggar Undang-Undang Spionase karena konon memasok WikiLeaks dengan video helikopter dan dokumen rahasia lainnya.

Jaksa berencana untuk menyajikan dokumen rahasia di pengadilan untuk menunjukkan bahwa kelompok teroris Al Qaeda telah diuntungkan dari dokumen rahasia yang dipasok Manning ke WikiLeaks. Sementara itu, hakim telah memutuskan bahwa Manning, yang dibiarkan telanjang di ruangan tanpa jendela selama 23 jam sehari, dikenakan kurungan "lebih keras dari yang diperlukan" sementara dia menunggu persidangannya, yang dijadwalkan akan dimulai pada musim panas. tahun 2013. Tak lama setelah kebocoran ketiga ini, beberapa perusahaan Internet besar mulai mematikan layanan untuk WikiLeaks. Ini termasuk PayPal dan Moneybookers, dua situs yang digunakan oleh pendukung WikiLeaks untuk menyumbangkan dana kepada organisasi tersebut. Setelah serangan penolakan layanan besar-besaran di situs WikiLeaks, organisasi tersebut pindah ke server Amazon. Namun, dalam beberapa hari, Amazon memutuskan tidak akan lagi meng-host situs tersebut. Hari berikutnya, 3 Desember 2010, nama domain Amerika penyedia sistem EveryDNS.net mengambil domain offline. Pendukung dan sukarelawan WikiLeaks segera merespons. Dua hari kemudian, 208 situs cermin WikiLeaks beroperasi. Pada 7 Desember, Julian Assange, pemimpin redaksi WikiLeaks, ditangkap di London pada waktu yang hampir bersamaan atas tuduhan pemerkosaan yang dikeluarkan dari Swedia. Assange berjuang ekstradisi ke Swedia dan akhirnya mencari dan menemukan suaka di kedutaan Ekuador di London. Bahkan dari suaka, Assange terus mengganggu pemerintah AS, menjadi tuan rumah konferensi video di PBB tentang upaya AS untuk memerangi WikiLeaks. Saat pertempuran online dan offline ini berkecamuk, publik dan media telah mengungkapkan berbagai pandangan. Banyak yang berpendapat bahwa WikiLeaks telah membahayakan keamanan nasional. Yang lain dengan gigih membela WikiLeaks dan kebebasannya untuk mempublikasikan kebocoran. WikiLeaks mendapat kecaman dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok pers bebas internasional Reporters Without Borders.

Ribuan dokumen berisi nama-nama informan Afghanistan, yang identitasnya sekarang terbongkar sehingga bisa menjadi sasaran Taliban sebagai pembalasan atas kerja sama mereka. Tindakan Assange juga memicu perbedaan pendapat di dalam organisasi WikiLeaks. Beberapa staf WikiLeaks merasa bahwa Assange telah mengabaikan ratusan kebocoran dari wilayah lain di dunia, untuk menargetkan pemerintah AS. Sekitar setengah lusin staf mengundurkan diri dalam beberapa bulan setelah Assange didakwa melakukan pemerkosaan. Staf ini meminta perhatian pada poin penting. Halaman Facebook WikiLeaks mengklaim "Kepentingan utama kami adalah mengungkap rezim yang menindas di Asia, bekas blok Soviet, Afrika SubSahara, dan Timur Tengah...." Namun sebagian besar dokumennya dirilis di 2010 menargetkan salah satu negara demokrasi terbesar dan paling stabil di dunia, Amerika Serikat. Julian Assange, pemimpin publik WikiLeaks, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menetapkan standar baru jurnalisme ilmiah. Dia telah menerbitkan analisis WikiLeaks tentang bahan sumber bersama dengan bahan sumber itu sendiri, sehingga para pembaca sendiri dapat mengambil kesimpulan sendiri.

Namun seperti sumber media lainnya, dia, stafnya, dan relawannya memilih sumber mana yang akan dibagikan, dan pilihan ini diwarnai oleh ideologi dan tujuan mereka sendiri. Apa ini, bagaimanapun, sulit untuk dipastikan. Sementara WikiLeaks

mengadvokasi transparansi dalam pemerintahan dan perusahaan, mengungkap rahasia mereka, organisasi itu sendiri jauh dari transparan, menjaga identitas sebagian besar anggotanya dan rahasia kontributor. Organisasi ini bergantung pada beberapa staf dan ratusan sukarelawan dari seluruh dunia. Relawan kunci hanya diketahui dengan inisial mereka, bahkan dalam obrolan online terenkripsi. Oleh karena itu, pertanyaan tentang bias atau motivasi atau tujuan akhir WikiLeaks tidak dapat diselesaikan secara pasti. Pada musim panas 2012, WikiLeaks memposting lebih dari dua juta email yang mendokumentasikan komunikasi antara pejabat pemerintah Suriah dan perusahaan swasta. WikiLeaks mengklaim di situsnya bahwa dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat mendukung pemerintah Suriah, yang telah membunuh ribuan warga sipil dalam perang saudara yang brutal. Jelas, WikiLeaks ingin menggambarkan dirinya sebagai pembela kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Namun, masih belum jelas apa konsekuensi politik dari kebocoran tersebut, dan apakah kebocoran tersebut akan berdampak positif atau negatif pada pemerintahan demokratis di seluruh dunia.

Pertanyaan Diskusi

1. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam studi kasus?

Jawab:

- WikiLeaks
- Karyawan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
- Diplomat Amerika Serikat
- Kedutaan Luar Negeri Amerika Serikat
- Tentara Amerika Serikat
- Wartawan Reuters
- Pemerintah Amerika Serikat
- Mahkamah Agung Amerika Serikat
- Presiden Richard Nixon
- Pentagon Papers
- Bradley Manning
- Teroris Al Qaeda
- Paypal
- Moneybookers
- Amazon
- Julian Assange
- Organisasi Hak Asasi Manusia
- Reporters Without Borders

- Informan Afghanistan
- Pejabat Pemerintah Suriah
- Pemerintah Swasta
- 2. Diskusikan kemungkinan masalah etika yang Anda temukan dari skenario ini.

Jawab:

- Dengan adanya kebebasan berpendapat pada situs WikiLeaks, maka dikhawatirkan akan adanya penyebaran informasi yang bersifat privasi kepada khalayak umum.
- Dengan adanya situs WikiLeaks, dapat membahayakan keamanan nasional.
- Adanya perbedaan pendapat positif dan negatif dari public.
- Dokumen rahasia yang di upload pada situs WikiLeaks dapat disalah gunakan dan menguntungkan organisasi terorisme.
- Belum jelas apa konsekuensi politik dari kebocoran data pada WikiLeaks dan apakah kebocoran tersebut akan berdampak positif atau negatif pada pemerintahan demokratis di seluruh dunia.

Sebelum Anda mulai, temukan pengetahuan berikut untuk mendukung pemahaman Anda:

1. Apa dasar perlindungan kebebasan berekspresi menurut hukum? Temukan lebih banyak lagi tentang hukum Indonesia terkait kebebasan berekspresi.

Jawab:

Tentang kebebasan berpendapat. Melalui survei yang dilakukan pada 11-21 Februari itu menunjukkan sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa takut berpendapat.

Kebebasan menjadi hal penting dalam negara demokratis seperti Indonesia. Kebebasan tersebut termasuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan mempertahankan argumen di muka umum.

Sebagian besar negara maju menjunjung tinggi nilai kebebasan setiap individu. Hak atas kebebasan ekspresi dan berpendapat di Amerika Serikat diatur dalam dokumen Virginia Bill of Rights (12 Juni 1776), Declaration of Independence (4 Juli 1776), dan Undang-Undang Dasar.

Hak atas kebebasan ekspresi dan berpendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Di Amerika Serikat dan di Indonesia juga diberlakukan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

2. Isu kebebasan berekspresi penting apa yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi? **Jawab :**

Kominfo Jamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya

Internet merupakan medium lain untuk bersosialisasi dan menjadi wahana mencari informasi. Jumlah penduduk yang semakin melek teknologi dan internet ini merupakan hal positif yang bisa berpengaruh pada kemajuan bangsa.

Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga pengguna Twitter teraktif setelah Brazil dan Amerika Serikat.

Media sosial sering kali menjadi tempat untuk mengeluarkan ekspresi dan pendapat. Bahkan saking dinamisnya, sedikit banyak media sosial juga mempengaruhi perkembangan media di Tanah Air, khususnya media online.

Karena pendekatannya hingga ke individual dari masing-masing pengguna internet, kebebasan berpendapat di dunia maya tentunya jadi sulit dikendalikan. Namun ini bukan masalah besar karena sudah ada peraturan perundangan seperti UU No.36 tahun 1999, UU No. 11 tahun 2008, dan UU No. 14 tahun 2008 untuk mengatur hal-hal seperti telekomunikasi dan keterbukaan informasi publik.

'Masyarakat bebas berkomentar di dunia maya sebagai media berdiskusi dan menyampaikan pendapat,' Jelas Kominfo.

Terakhir, tulislah pelajaran yang dipetik dari studi kasus berdasarkan sudut pandang Anda terutama terkait dengan kebebasan berekspresi.

Jawab:

Berdasarkan sudut pandang kami, sebaiknya dalam berpendapat jangan takut dan selalu mengekpresikan secara bebas. Kebebasan berekspresi ini sangat penting dalam individu maupun berkelompok karena dari informasi yang didapatkan bisa bermanfaat bagi siapapun. Tetapi kebebasan ini juga harus melihat aspek yang lain seperti kebebasan yang kita miliki harus juga memperhatikan hak yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita bertanggung jawab dibalik kebebasan, maka kita tidak akan merugikan

orang lain dan saling menghormati. Selain itu, kita bisa berkumpul dan berdemonstrasi menuntut hak kita dan orang lain. Kita juga bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendesak transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang.

Referensi:

 $\frac{https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/76/61/269\#:\sim:text=Norma\%20hak\%20atas\%20kebebasan\%20berekspresi\%20dan\%20berpendapat\%20di\%20Indonesia\%20diatur,Pasal\%2028\%20E\%2C\%20Pasal\%2028F.$

https://nasional.tempo.co/read/1580792/kebebasan-berpendapat-dilindungi-uud-1945-ini-landasan-hukumnya

http://www.teknoup.com/news/17051/kominfo-jamin-kebebasan-berpendapat-di-dunia-maya/

Diskusi

